



DJKN

LAPORAN KINERJA

KPKNL PALANGKARAYA

**20
24**



Nilai - Nilai Kementerian Keuangan

Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi

Sinergi

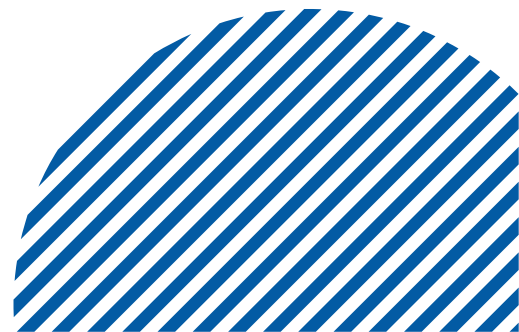
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Palangkaraya | 1 |
| C. Peran Strategis KPKNL Palangkaraya | 4 |
| D. Sistematika Laporan | 5 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 6 |
| B. Perjanjian Kinerja | 7 |
| C. Pengukuran Kinerja | 10 |
| D. Adendum Perjanjian Kinerja | 11 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 13 |
| B. Kinerja Lainnya | 31 |
| C. Realisasi Anggaran | 33 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Penutup | 35 |
| LAMPIRAN | |

PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau sasaran strategis DJKN pada tingkat KPKNL Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini sekaligus menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL Palangkaraya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholder* dan masyarakat pengguna layanan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta nota dinas dari Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor ND-52/WKN.12/2024 tanggal 8 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024. Laporan Kinerja ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja KPKNL Palangkaraya secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perwujudan *good governance*.

Berdasarkan laporan capaian kinerja tahun 2024 KPKNL Palangkaraya mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), KPKNL Palangkaraya memiliki 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), dan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palangkaraya sebesar 116,58%. NKO tersebut merupakan hasil perhitungan capaian IKU/Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three*, dengan rincian sebanyak 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang beberapa kali telah dilakukan addendum terhadap target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja yang akan menjadi dasar untuk usul penetapan target dalam mengajukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 serta dasar pengambilan kebijakan atau langkah-langkah guna pencapaian target tahun berikutnya.

Kami harapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPKNL Palangkaraya tahun 2024 dan menjadi tolak ukur kegiatan di saat ini dan di masa depan. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Palangkaraya kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Palangka Raya ,
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Fredy Himarwanto



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Palangkaraya Tahun 2024 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Palangkaraya Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL tersebut ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan Balance Scorecard (BSC) yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Palangkaraya tahun 2024.

KPKNL Palangkaraya memperoleh pencapaian terhadap 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) IKU tahun 2024 sebesar 116,58%. Pencapaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Bagan 1.
Rincian Capaian Kinerja KPKNL Palangkaraya

| Stakeholder (30%) | Customer Perspective (20%) | Internal Process Perspective (25%) | Learning Growth & Perspective (25%) |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa ✓ Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal ✓ Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif ✓ Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif ✓ Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan professional ✓ Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif ✓ Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif ✓ Pengelolaan keuangan yang akuntabel ✓ Komunikasi publik yang efektif ✓ Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah |

Sebagai unit vertikal yang memberikan pelayanan, KPKNL akan terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan terhadap pemangku kepentingan. Untuk itu, KPKNL Palangkaraya akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL Palangkaraya sebagai unit vertikal DJKN yang kondusif semakin meningkat.



BABI PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL PALANGKARAYA

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangkaraya merupakan kantor operasional yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan negara, penilaian, piutang negara, dan pelayanan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Susunan organisasi KPKNL Palangkaraya sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu :

Diagram 1.1

Struktur Organisasi KPKNL Palangkaraya

STRUKTUR ORGANISASI KPKNL PALANGKA RAYA



Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh sumber daya manusia yang ada pada KPKNL Palangkaraya yang berjumlah:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

| TINGKAT PENDIDIKAN | GOLONGAN RUANG | | | | JUMLAH |
|--------------------|----------------|----|-----|----|--------|
| | I | II | III | IV | |
| SD | - | - | - | - | - |
| SLTP | - | - | - | - | - |
| SMA/SMK | - | - | 3 | - | 3 |
| DI | - | - | - | - | - |
| DIII | - | 5 | 4 | - | 9 |
| DIV/S1 | - | - | 8 | 1 | 9 |
| S2 | - | - | 2 | 3 | 5 |
| S3 | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | - | 5 | 17 | 4 | 26 |

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

| KELOMPOK UMUR | GOLONGAN RUANG | | | | JUMLAH |
|---------------|----------------|----|-----|----|--------|
| | I | II | III | IV | |
| 18-30 | - | 5 | - | - | 5 |
| 31-40 | - | - | 8 | - | 8 |
| 41-50 | - | - | 5 | 2 | 7 |
| Di atas 50 | - | - | 4 | 2 | 6 |
| JUMLAH | - | 5 | 17 | 4 | 26 |

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

| JENIS KELAMIN | GOLONGAN RUANG | | | | JUMLAH |
|---------------|----------------|----|-----|----|--------|
| | I | II | III | IV | |
| Perempuan | - | 4 | - | - | 4 |
| Laki-laki | - | 1 | 17 | 4 | 22 |
| JUMLAH | - | 5 | 17 | 4 | 26 |

Tabel 1.4

Komposisi Tenaga Fungsional

| No | Fungsional | Jumlah |
|---------------|--------------------------|-----------|
| 1 | Jafung Pelelang | 2 |
| 2 | Juru Sita | 3 |
| 3 | Pemeriksa Piutang Negara | 1 |
| 4 | Jafung Penilai | 4 |
| 5 | Pranata Keuangan APBN | - |
| Jumlah | | 10 |

C. PERAN STRATEGIS KPKNL PALANGKARAYA

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Palangkaraya memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Palangkaraya memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna kekayaan negara terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara dan pembinaan serta penatausahaan kekayaan negara. Sebagai aset *manager*, KPKNL Palangkaraya mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal, dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Palangkaraya sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Palangkaraya dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan, pemindahtanganan BMN, Pemanfaatan BMN, inventarisasi dan sertifikasi.

2. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Hasil penilaian kekayaan negara antara lain digunakan untuk penyusunan rencana pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil, penilaian juga dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Highest and Best Use*.

3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Lelang juga merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta dan transport untuk kepentingan peralihan hak.

4. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara merupakan pelayanan yang diberikan kepada instansi/badan/lembaga negara yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet sehingga sulit tertagih setelah dilakukan upaya penagihan. Piutang yang macet yang sulit tertagih tersebut dapat diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara (PUPN) yang pengurusannya diselenggarakan oleh KPKNL sebagai upaya penyelamatan keuangan negara sekaligus upaya penegakan hukum (*Law enforcement*) dalam masyarakat.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa Biaya Administrasi (biad) pengurusan piutang negara dan bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang berlaku. Selain itu, dari hasil pemanfaatan BMN juga termasuk dalam PNBP yang disetor oleh Kementerian/Lembaga yang asetnya dimanfaatkan.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan ini, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Lampiran

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan selama tahun 2024, KPKNL Palangkaraya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam BAB II Laporan ini. Dengan disusunnya LAKIN KPKNL Palangkaraya Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Palangkaraya di tahun yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Palangkaraya **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**.

Untuk merealisasikan tersebut, KPKNL Palangkaraya mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Palangkaraya adalah pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien serta birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Pada dasarnya sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Sasaran yang hendak dicapai oleh KPKNL Palangkaraya adalah:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Pengelolaan piutang negara dan Lelang yang optimal;
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;
5. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif;
6. Penerapan tata Kelola piutang negara dan Lelang yang produktif;
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.
10. Komunikasi publik yang efektif;
11. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran setrategis KPKNL Palangkaraya. Sasaran strategis KPKNL Palangkaraya telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Palangkaraya sesuai Bagan 2.1. sebagai berikut:

Bagan 2.1

Peta Strategi 2024 KPKNL Palangkaraya



Peta Strategi KPKNL Palangkaraya menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholder perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sementara *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari Peta Strategi KPKNL Tahun 2024 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis sebanyak 11 (sebelas) dan IKU yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. Perjanjian Kinerja KPKNL Palangkaraya mengalami tiga kali addendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK 01/WKN/2024 tanggal 31 Januari 2024. Untuk

dokumen Perjanjian Kinerja dan addendum dimaksud, terlampir disampaikan pada Lampiran Laporan Kinerja ini. Adapun keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU Kepala KPKNL Palngkaraya dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

Sasaran Strategis 1

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------|--|--------|--------|
| 1.a | Indeks integritas | Indeks | 89,17 |
| 1.b | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | % | 100 |

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------|---|--------|--------|
| 2.a | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan | Indeks | 71,5 |
| 2.b | Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN | Indeks | 86,5 |

Sasaran Strategis 3

Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------|---|--------|--------|
| 3.a | Persentase realisasi pokok lelang | % | 100 |
| 3.b | Persentase penurunan outstanding piutang negara | % | 100 |

Sasaran Strategis 4

Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------|---|--------|--------|
| 4.a | Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian | Indeks | 75 |

Sasaran Strategis 5

Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------|--|--------|--------|
| 5.a | Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan | % | 100 |
| 5.b | Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | % | 100 |

Sasaran Strategis 6

Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------|--|--------|--------|
| 6.a | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang negara | % | 43 |
| 6.b | Persentase produktivitas lelang | % | 89 |

Sasaran Strategis 7

Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------|--|--------|--------|
| 7.a | Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian | % | 16 |

Sasaran Strategis 8

Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------|--|--------|--------|
| 8.a | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | % | 90 |
| 8.b | Indeks kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko | Indeks | 85 |

Sasaran Strategis 9

Pengelolaan keuangan yang akuntabel

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------|---|--------|--------|
| 9.a | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | Indeks | 100 |
| 9.b | Persentase deviasi data PNBPF fungsional DJKN | % | 10 |

Sasaran Strategis 10

Komunikasi publik yang efektif

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------|--|--------|--------|
| 10.a | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | Indeks | 80 |

Sasaran Strategis 11

Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------|--|--------|--------|
| 11.a | Indeks efektivitas UKI | Indeks | 82 |
| 11.b | Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM | % | 100 |

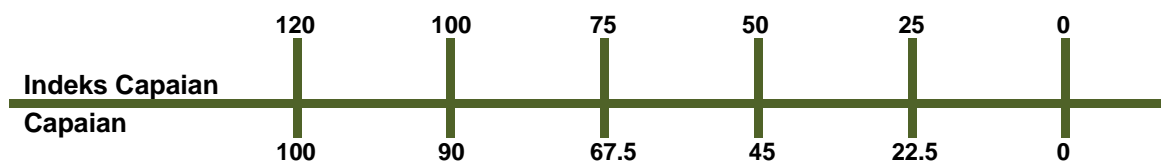
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Palangkaraya melaksanakan program yaitu:

| Program/ Kegiatan Tahun 2024 | Anggaran | |
|---|-----------|-------------------------|
| Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko | Rp | 372.091.000,00 |
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp | 14.818.000,00 |
| 2. Pengelolaan Aset | Rp | 357.273.000,00 |
| Program Dukungan Manajemen | Rp | 3.397.218.000,00 |
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp | 21.554.000,00 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp | 3.375.664.000,00 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp | 8,688.000,00 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp | 14.826.000,00 |

C. PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja tahun 2024, KPKNL berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximiza* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$$

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki *Stabilize*

$$C_{n+1} - C_n$$

I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian di bawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian di atasnya
 C_a = Capaian awal
 C_n = Realisasi/target x 100%
 C_n = Capaian dengan ketentuan:

- a. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$, di mana C_a maksimum adalah 200%
- b. Apabila Realisasi < Target, maka:
 $C_n = C_a$
 C_{n-1} = Capaian di bawahnya
 C_{n+1} = Capaian di atasnya

$$I = I + \frac{C_{n+1} - C_n}{C_n} \times I_n$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

D. ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

Selain addendum Perjanjian Kinerja yang telah disampaikan sebelumnya, juga terdapat addendum target raw data antara lain:

- IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
- IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang;
- IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara;
- IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara.

Untuk rincian addendum raw data dimaksud akan disajikan dalam pembahasan capaian kinerja pada Bab III.



BAB III

AKUNTABILITAS

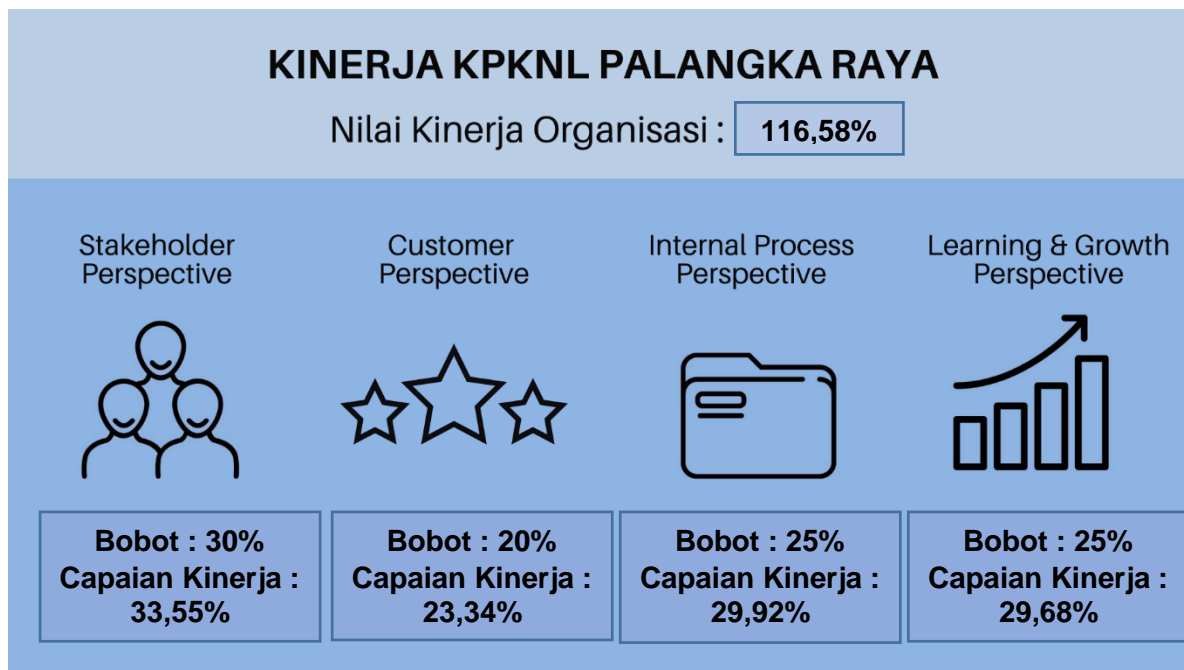
KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja KPKNL Palangkaraya tahun 2024 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dan IKU. Pada tahun 2024, KPKNL Palangkaraya telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Pengelolaan piutang negara dan Lelang yang optimal;
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;
5. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif;
6. Penerapan tata Kelola piutang negara dan Lelang yang produktif;
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.
10. Komunikasi publik yang efektif;
11. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

Untuk mencapai 11 (sebelas) Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2024 KPKNL Palangkaraya menetapkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2024 sebesar 116,58%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing masing perspektif. Berikut penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis:



| No | SS/IKU | V/C | Target* | Realisasi | Bobot Awal | Bobot Akhir IKU | Indeks Tanpa Batas | Indeks Max. 120% | Keterangan |
|---------------------------------|--|------------|---------|-----------|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | STAKEHOLDER | 30% | | | | | | 33,55% | |
| 01 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | | | | | | | 111,83% | Hijau |
| 01a-CP | Indeks Integritas | P/M | 89,17 | 92,44 | 14,00% | 50,00% | 103,67% | 103,67% | Hijau |
| 01b-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | P/M | 100,00% | 124,37% | 14,00% | 50,00% | 124,37% | 120,00% | Hijau |
| | CUSTOMER | 20% | | | | | | 23,35% | |
| 02 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa | | | | | | | 117,80% | Hijau |
| 02a-CP | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | P/L | 71,50% | 90,40% | 19,00% | 50,00% | 126,43% | 120,00% | Hijau |
| 02b-CP | Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | P/L | 86,50% | 100,00% | 19,00% | 50,00% | 115,61% | 115,61% | Hijau |
| 03 | Pengelolaan piutang negara dan Lelang yang optimal | | | | | | | 112,40% | Hijau |
| 03a-CP | Persentase Realisasi Pokok Lelang | P/M | 100,00% | 113,10% | 14,00% | 50,00% | 113,10% | 113,10% | Hijau |
| 03b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | P/M | 100,00% | 111,70% | 14,00% | 50,00% | 111,70% | 111,70% | Hijau |
| 04 | Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien | | | | | | | 120,00% | Hijau |
| 04a-CP | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | P/M | 75,00 | 99,96 | 14,00% | 100,00% | 133,28% | 120,00% | Hijau |
| | INTERNAL PROCESS | 25% | | | | | | 30,00% | |
| 05 | Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif | | | | | | | 120,00% | Hijau |
| 05a-CP | Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan | P/M | 100,00% | 176,00% | 14,00% | 50,00% | 176,00% | 120,00% | Hijau |
| 05b-CP | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | P/M | 100,00% | 161,22% | 14,00% | 50,00% | 161,22% | 120,00% | Hijau |
| 06 | Penerapan tata Kelola piutang negara dan Lelang yang produktif | | | | | | | 120,00% | Hijau |
| 06a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | P/M | 43,00% | 150,00% | 14,00% | 50,00% | 148,84% | 120,00% | Hijau |
| 06b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | P/M | 89,00% | 146,73% | 14,00% | 50,00% | 164,87% | 120,00% | Hijau |
| 07 | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | | | 120,00% | Hijau |
| 07a-CP | Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | P/M | 16,00% | 0,00% | 14,00% | 100,00% | 200,00% | 120,00% | Hijau |
| | LEARNING AND GROWTH | 25% | | | | | | 29,68% | |
| 08 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 116,74% | Hijau |
| 08a-N | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | P/M | 90,00% | 126,88% | 14,00% | 50,00% | 140,97% | 120,00% | Hijau |
| 08b-N | Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko | P/M | 85,00 | 96,45 | 14,00% | 50,00% | 113,47% | 113,47% | Hijau |
| 09 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | 120,00% | Hijau |
| 09a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | P/M | 100,00 | 120,00 | 14,00% | 50,00% | 120,00% | 120,00% | Hijau |
| 09b-CP | Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN | P/M | 10,00% | 0,00% | 14,00% | 50,00% | 200,00% | 120,00% | Hijau |
| 10 | Komunikasi publik yang efektif | | | | | | | 120,00% | Hijau |
| 10a-CP | Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) | P/M | 80,00 | 100,00 | 14,00% | 100,00% | 125,00% | 120,00% | Hijau |
| 11 | Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah | | | | | | | 118,16% | Hijau |
| 11a-CP | Indeks Efektivitas UKI | P/M | 82,00 | 95,38 | 14,00% | 50,00% | 116,32% | 116,32% | Hijau |
| 11b-N | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM | P/M | 100,00 | 120,00 | 14,00% | 50,00% | 120,00% | 120,00% | Hijau |
| NILAI KINERJA ORGANISASI | | | | | | | | 116,58% | Hijau |

Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. DJKN sebagai pengelolaan kekayaan negara dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|---------|---------|---------|------------|
| KPKNL Palangkaraya | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | | | | | | | |
| | O1a-CP Indeks Integritas | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 89,17 | 89,17 | Max TLK |
| REALISASI | 10 | 20 | 20 | 42 | 42 | 92,44 | 92,44 | |
| CAPAIAN | 100% | 100% | 100% | 140% | 140% | 103,67% | 103,67% | |
| NILAI KINERJA | 100% | 100% | 100% | 120% | 120% | 103,67% | 103,67% | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| KPKNL Palangkaraya | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | | | | | | | |
| | O1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/ KP |
| TARGET | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max TLK |
| REALISASI | 6.042.956.077,00 | 11.321.360.954,00 | 11.321.360.954,00 | 13.657.523.294,00 | 13.657.523.294,00 | 17.494.846.028,00 | 17.494.846.028,00 | |
| CAPAIAN | 317,82% | 120,72% | 120,72% | 107,43% | 107,43% | 124,37% | 124,37% | |
| NILAI KINERJA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 107,43% | 107,43% | 120,00% | 120,00% | |

Untuk penjelasan capaian IKU sebagai berikut:

- a. Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam Laporan Kinerja KPKNL Palangkaraya Tahun 2024 melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d. Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian di dalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK. Adapun target indeks integritas KPKNL Palangkaraya pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 89,17 dengan realisasi sebesar 92,44 yang diperoleh dari perhitungan komponen penilaian hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dikurangi dengan komponen penilaian faktor koreksi (misal: keterjadian fraud, hasil audit investigasi, pengondisian, dsb.) ditambah komponen penilaian tindak lanjut SPI, tindak lanjut pengaduan, tindak lanjut hukdis, dan realisasi kegiatan pencegahan.

Langkah-langkah dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Menekankan kepada seluruh pejabat/pegawai untuk selalu menolak terhadap upaya pemberian gratifikasi.
- Melakukan sosialisasi tentang antikorupsi, tolak gratifikasi, dan penguatan integritas, baik kepada internal kantor maupun eksternal (stakeholder dan masyarakat).
- Terus menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam setiap pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.
- Penguatan tiga lini sistem pengendalian intern, yakni Manajemen Operasional, Unit Kepatuhan Internal, dan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan semua tugas dan fungsi, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindakan fraud.

- b. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diperoleh dari nominal capaian PNBPN Aset yang merupakan hasil penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang dikelola oleh KPKNL dan sudah dikonfirmasi eksekusinya

kepada satuan kerja atau Kementerian/ Lembaga (K/L) bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan ditambah PNBPN piutang negara yang merupakan nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL ditambah PNBPN lelang yang merupakan nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa bea lelang pembeli dan penjual, biaya permohonan lelang, uang jaminan pembeli wanprestasi, penerbitan kutipan risalah lelang pengganti kemudian dibandingkan dengan nominal target total PNBPN Aset ditambah PNBPN piutang negara dan PNBPN lelang. Realisasi IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Palangkaraya tahun 2024 adalah sebesar Rp17.494.846.028,00 atau 124,37% yang diperoleh dari nominal realisasi PNBPN pengelolaan BMN sebesar Rp11.351.846.932,00 ditambah PNBPN piutang negara sebesar Rp57.129.109,00 dan PNBPN lelang sebesar Rp6.085.869.987,00 kemudian dibandingkan dengan jumlah nominal target yang pada awal tahun sebesar Rp10.057.000.000,00 karena pada Triwulan I realisasi telah melampaui target tahunan maka dilakukan addendum target raw data menjadi sebesar Rp14.067.000.000,00 yang terdiri dari nominal target PNBPN Aset sebesar Rp8.925.000.000,00 ditambah PNBPN piutang negara sebesar Rp32.000.000,00 dan PNBPN lelang sebesar Rp5.110.000.000,00.

Tantangan dan hambatan dalam pencapaian target, antara lain:

- Untuk pencapaian PNBPN pengelolaan Kekayaan Negara/BMN, satuan kerja (satker) belum sepenuhnya memahami dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai pentingnya pengelolaan (pemanfaatan) BMN.
- Untuk pencapaian PNBPN piutang negara, sebagian besar Penanggung Utang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran utangnya dan hanya sebagian kecil Penanggung Utang yang melakukan pembayaran/angsuran.
- Untuk pencapaian PNBPN lelang, masih cukup banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP), terutama lelang eksekusi hak tanggungan

Langkah-langkah dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Melakukan bimbingan teknis pengelolaan kekayaan negara melalui sosialisasi, konsultasi, dan koordinasi yang lebih ditekankan untuk pemanfaatan BMN.
- Mengoptimalkan pemantauan secara periodik maupun insidental terkait wasdal.
- Melakukan penagihan langsung/melalui surat, baik kepada Penanggung Utang/Penjamin Utang untuk penyelesaian piutang negara.
- Melakukan monitoring dan mengawal khusus Penanggung Utang yang melakukan pembayaran/angsuran secara rutin.
- Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Palangkaraya.

Perbandingan realisasi Indeks Integritas dan persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi |
| 1a-CP | Indeks Integritas | - | - | - | 88,67 89,17 | 89,17 92,44 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | Rp8.281.990.593 Rp2.353.743.583 | Rp6.011.810.169 Rp8.499.182.877 | Rp6.273.895.500 Rp15.665.527.734 | Rp6.505.000.000 Rp13.053.868.681 | Rp14.067.000.000 Rp17.494.846.028 |
| | a. PNBP Aset | Rp.7.110.321.936 Rp1.697.684.347 | Rp5.000.000.000 Rp7.562.588.988 | Rp5.200.000.000 Rp14.112.937.458 | Rp5.400.000.000 Rp11.925.585.247 | Rp8.925.000.000 Rp11.351.846.932 |
| | b. PNBP piutang negara | Rp20.518.657 Rp128.885.855 | Rp75.810.169 Rp96.975.085 | Rp73.895.500 Rp97.245.429 | Rp30.000.000 Rp41.365.223 | Rp32.000.000 Rp57.129.109 |
| | c. PNBP lelang | Rp1.151.150.000 Rp527.173.379 | Rp936.000.000 Rp839.618.794 | Rp1.000.000.000 Rp1.455.344.847 | Rp1.075.000.000 Rp1.086.918.211 | Rp5.110.000.000 Rp6.085.869.987 |

Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| KPKNL Palangkaraya | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 02a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 30% | 50% | 50% | 60% | 60% | 71,50% | 71,50% | Max TLK |
| REALISASI | 30,00% | 87,23% | 87,23% | 90,59% | 90,59% | 90,40% | 90,40% | |
| CAPAIAN | 30,00% | 87,23% | 87,23% | 90,59% | 90,59% | 90,40% | 90,40% | |
| NILAI KINERJA | 100,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

| KPKNL Palangkaraya | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 02b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 10% | 45% | 45% | 60% | 60% | 86,50% | 86,50% | Max TLK |
| REALISASI | 10,00% | 89,74% | 89,74% | 89,74% | 89,74% | 100,00% | 100,00% | |
| CAPAIAN | 10,00% | 89,74% | 89,74% | 89,74% | 89,74% | 100,00% | 100,00% | |
| NILAI KINERJA | 100,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 115,61% | 115,61% | |

Untuk penjelasan capaian IKU sebagai berikut:

- Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai SBSK yang merupakan hasil perhitungan tingkat

kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Adapun realisasi IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK KPKNL Palangkaraya tahun 2024 adalah sebesar 90,40% dari target IKU yang ditetapkan sebesar 71,50%.

- b. Tingkat efektifitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada pengguna barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang. IKU tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN KPKNL Palangkaraya tahun 2024 dari target sebesar 86,50% telah terealisasi sebesar 100%.

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi pencapaian IKU adalah Satuan kerja (satker) belum sepenuhnya memahami dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai pentingnya pengelolaan BMN. Adapun langkah-langkah dalam pencapaian 2 target IKU ini, antara lain adalah:

- Melakukan bimbingan teknis pengelolaan kekayaan negara melalui sosialisasi, konsultasi, dan koordinasi yang lebih ditekankan untuk pemanfaatan BMN.
- Mengoptimalkan pemantauan secara periodik maupun insidental terkait wasdal.

Perbandingan realisasi Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan Tingkat efektifitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi |
| 2a-CP | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) | 100% 100% | 62% 82,45% | 65% 74,45% | 68% 82,07% | 71,50% 90,40% |
| 2b-CP | Tingkat efektifitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN | 80% 70,31% | 85% 90,14% | 85% 100% | 86% 100% | 86,50% 100% |

Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan piutang negara dan Lelang yang optimal

Berdasarkan Pasal 27, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam lingkup pengelolaan kekayaan negara, DJKN turut berperan dalam melaksanakan pengelolaan piutang negara serta pelayanan lelang. Dalam sasaran ini, Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang optimal adalah pengelolaan piutang negara yang efektif mencakup proses identifikasi, penagihan, dan penyelesaian piutang. Selain itu

layanan lelang diharapkan dapat mendorong peran penegakan hukum serta penguatan keuangan negara melalui layanan lelang yang transparan, efektif, dan akuntabel. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| KPKNL Palangkaraya | Pengelolaan piutang negara dan Lelang yang optimal | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | 03a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max TLK |
| REALISASI | 121.667.117.621,00 | 132.796.199.238,00 | 132.796.199.238,00 | 144.299.506.571,00 | 144.299.506.571,00 | 162.869.388.012,00 | 162.869.388.012,00 | |
| CAPAIAN | 3379,64% | 737,76% | 737,76% | 445,37% | 445,37% | 113,10% | 113,10% | |
| NILAI KINERJA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 113,10% | 113,10% | |

| KPKNL Palangkaraya | Pengelolaan piutang negara dan Lelang yang optimal | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 03b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Max TLK |
| REALISASI | 49.353.540,00 | 2.162.219.293,49 | 2.162.219.293,49 | 10.580.504.145,01 | 10.580.504.145,01 | 11.521.979.145,01 | 11.521.979.145,01 | |
| CAPAIAN | 9,44% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 111,70% | 111,70% | |
| NILAI KINERJA | 9,44% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 111,70% | 111,70% | |

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persentase realisasi pokok lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I (Fungsional Pelelang) dan Pegadaian dalam periode tertentu. Pada Awal tahun 2024 total target pokok lelang sebesar Rp36.000.000.000,00 karena pada triwulan II dan III realisasi telah melampaui target tahunan maka pada IKU ini dilaksanakan addendum target raw data sehingga menjadi total target pokok lelang KPKNL Palangkaraya tahun 2024 sebesar Rp144.007.000.000,00 berasal dari pokok lelang PL Kelas I (Fungsional Pelelang) sebesar Rp134.0070.000.000,00 dan pokok lelang Pegadaian sebesar Rp10.000.000.000,00. IKU persentase realisasi pokok lelang KPKNL Palangkaraya tahun 2024 telah tercapai 133,10% atau sebesar Rp162.869.388.012,00 yang berasal dari pokok lelang PL Kelas I (Fungsional Pelelang) sebesar Rp154.120.546.712,00 dan pokok lelang Pegadaian sebesar Rp8.748.841.300,00. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain adalah produktivitas lelang eksekusi yang rendah atau masih cukup banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP), terutama lelang eksekusi hak tanggungan. Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:
 - Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
 - Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).

- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Palangkaraya.

b. Persentase penurunan outstanding piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding Berkas Kasus Piutang Negara (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU persentase penurunan outstanding piutang negara, yaitu untuk seluruh Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen Piutang Negara Dapat Disetor (PNDS), Penarikan, Pengembalian, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dan Keringanan Utang. Pada triwulan III tahun 2024 realisasi IKU persentase penurunan outstanding piutang negara pada KPKNL Palangkaraya telah melampaui target tahunan, sehingga terhadap IKU ini dilakukan addendum target raw data, yang semula sebesar Rp5.230.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.314.700.000,00. Adapun realisasi IKU persentase penurunan outstanding piutang negara KPKNL Palangkaraya tahun 2024 adalah sebesar Rp11.521.979.145,00 dengan persentase sebesar 111,70%.

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain adalah:

- Sebagian besar Penanggung Utang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran utangnya dan hanya sebagian kecil Penanggung Utang yang melakukan pembayaran/angsuran.
- Sebagian besar piutang negara yang dilakukan pengurusan tidak didukung dengan barang jaminan utang.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:

- Melakukan penagihan langsung/melalui surat, baik kepada Penanggung Utang/Penjamin Utang untuk penyelesaian piutang negara.
- Meningkatkan/mengoptimalkan tahap pengurusan piutang negara;
- Mendorong debitur untuk mengikuti crashprogram.

Perbandingan realisasi persentase realisasi pokok lelang dan persentase penurunan outstanding piutang negara dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi |
| 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | Rp33.997.460.000 Rp16.866.422.418 | Rp19.000.000.000 Rp26.950.895.614 | Rp21.000.000.000 Rp43.372.582.490 | Rp28.000.000.000 Rp37.594.514.984 | Rp144.007.000.000 Rp162.869.388.012 |
| | a. Pokok Lelang PL Kelas I | Rp24.197.460.000 Rp11.043.331.118 | Rp13.000.000.000 Rp 16.012.465.614 | Rp17.000.000.000 Rp1.566.468.028 | Rp20.000.000.000 Rp26.989.253.084 | Rp134.0070.000.000 Rp154.120.546.712 |
| | b. Pokok Lelang Pegadaian | Rp5.823.091.300 Rp9.800.000.000 | Rp6.000.000.000 Rp10.938.430.000 | Rp4.000.000.000 Rp1.225.630.800 | Rp8.000.000.000 Rp10.605.261.900 | Rp10.000.000.000 Rp8.748.841.300 |
| 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | Rp70.709.002.716 Rp 11.910.773.745 | Rp16.392.875.119 Rp44.365.014.142 | Rp7.985.141.740 Rp8.222.238.024 | Rp1.877,756,000 Rp2,162,387,928 | Rp10.314.700.000 Rp11.521.979.145 |

Sasaran Strategis 4 : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 1 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| KPKNL Palangkaraya | Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | 04a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Max TLK |
| REALISASI | 95,58 | 98,90 | 98,90 | 107,88 | 107,88 | 99,96 | 99,96 | |
| CAPAIAN | 95,58 | 98,90 | 98,90 | 107,88 | 107,88 | 99,96 | 99,96 | |
| NILAI KINERJA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Penilaian secara tepat waktu adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan. Target IKU rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien KPKNL Palangkaraya tahun 2024 adalah sebesar 75 dengan realisasi indeks rata-rata penyelesaian sebesar 99,96. Tantangan dan hambatan untuk mencapai IKU ini adalah cukup tingginya frekuensi/ volume permohonan penilaian sedangkan belum adanya kewajiban dari pemohon penilaian melakukan penginputan permohonan penilaian melalui aplikasi SIP (alat bantu penilai). Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan koordinasi maupun menghimbau kepada pemohon penilaian untuk mengajukan permohonan penilaian melalui aplikasi SOP serta melakukan bimbingan/ sosialisasi penginputan aplikasi SIP.

Perbandingan Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut (IKU mulai ada tahun 2023) :

| Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi |
| 04a-CP | Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian | - | - | - | 70 89,55 | 75 99,96 |

Sasaran Strategis 5 : Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam Siklus BMN, diantaranya meliputi perencanaan,

penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara dikatakan efektif apabila penerapan pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik, tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| KPKNL Palangkaraya | Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 05a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% | Max TLK |
| REALISASI | 20,00% | 120,00% | 120,00% | 146,67% | 146,67% | 176,00% | 176,00% | |
| CAPAIAN | 20,00% | 120,00% | 120,00% | 146,67% | 146,67% | 176,00% | 176,00% | |
| NILAI KINERJA | 100,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

| KPKNL Palangkaraya | Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 05b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 10% | 32% | 32% | 80% | 80% | 100% | 100% | Max TLK |
| REALISASI | 100,00% | 121,79% | 121,79% | 196,43% | 196,43% | 161,22% | 161,22% | |
| CAPAIAN | 100,00% | 121,79% | 121,79% | 196,43% | 196,43% | 161,22% | 161,22% | |
| NILAI KINERJA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan adalah pelaksanaan sertifikasi tanah BMN yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Adapun realisasi IKU persentase bidang tanah BMN yang disertipikasikan pada KPKNL Palangkaraya tahun 2024 adalah sebesar 176%. Di mana realisasi ini diperoleh dari bidang tanah yang ditargetkan disertipikasikan tahun 2024 sebanyak 75 bidang dengan realisasi bidang tanah yang telah disertipikasikan sebanyak 132 bidang. Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah:

- Untuk mencapai IKU ini melibatkan 3 pihak yaitu Satker, Kantor Pertanahan dan KPKNL.
- Target BMN tanah yang akan disertipikat terdapat perbedaan data luasan, data sumber dan atau lokasi tidak sesuai.
- Satker kesulitan menentukan swaploting titik- titik koordinat batas tanah secara tepat.
- Satker masih belum memahami aplikasi SIMAN.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan KPKNL untuk mencapai target IKU ini adalah:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Satker maupun Kantor Pertanahan
- Bersama- sama dengan Satker mengidentifikasi titik koordinat batas- batas tanah secara langsung *on the spot*.
- Melakukan sosialisasi aplikasi SIMAN kepada Satker- Satker di wilayah kerja KPKNL Palangkaraya.

- b. Persentase Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Target IKU evaluasi kinerja BMN (portofolio

aset) KPKNL Palangkaraya tahun 2024 adalah 100% terdiri dari jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya sebanyak 60 aset dan jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker sebanyak 5 aset. Dari target tersebut, diperoleh realisasi sebanyak 72 aset untuk jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya dan 7 aset untuk jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker atau sebesar 161,22%. Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah data master aset pada aplikasi SIMAN tidak terupdate serta aset belum ditemukan. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan KPKNL untuk mencapai target IKU ini adalah:

- Melakukan sosialisasi aplikasi SIMAN kepada Satker- Satker di wilayah kerja KPKNL Palangkaraya.
- Melakukan pemetaan terhadap aset yang dijadikan target.

Perbandingan Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan dan Persentase Evaluasi kinerja BMN dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi |
| 05a-CP | Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan | 100% 100% | 100% 120,57% | 100% 100,93% | 100% 146,77% | 100% 176% |
| 05a-CP | Persentase Evaluasi kinerja BMN | 100% 109,38% | 100% 122,11% | 100% 112,14% | 100% 142,82% | 100% 120,41% |

Sasaran Strategis 6 : Penerapan tata Kelola piutang negara dan Lelang yang produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dibidang piutang negara dan lelang, penerapan tata kelola piutang negara dan lelang dikatakan efektif apabila pelaksanaan pengelolaan piutang negara serta pelayanan lelang yang dilaksanakan dapat sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance), tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| KPKNL Palangkaraya | Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 100% | 93% | 93% | 79% | 79% | 43% | 43% | Min |
| REALISASI | 0,00% | 23,04% | 23,04% | 54,25% | 54,25% | 150,00% | 150,00% | TLK |
| CAPAIAN | 0,00% | 23,04% | 23,04% | 54,25% | 54,25% | 150,00% | 150,00% | |
| NILAI KINERJA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

| KPKNL Palangkaraya | Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 30% | 45% | 45% | 60% | 60% | 89% | 89% | Max |
| REALISASI | 58,13% | 76,07% | 76,07% | 95,52% | 95,52% | 146,73% | 146,73% | TLK |
| CAPAIAN | 58,13% | 76,07% | 76,07% | 95,52% | 95,52% | 146,73% | 146,73% | |
| NILAI KINERJA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Saldo awal BKPN KPKNL Palangkaraya adalah 14 BKPN dengan target pada awal tahun 2024 sebesar 43% (minimize) atau saldo 6 BKPN. IKU ini mengalami adendum target raw data menjadi 36 % (minimize) atau saldo 5 BKPN, sedangkan realisasi jumlah penyelesaian BKPN KPKNL Palangkaraya tahun 2024 dengan saldo sebanyak 4 BKPN. Tantangan pencapaian IKU ini adalah rendahnya jumlah penyerahan BKPN baru, dihadapi dengan melakukan langkah-langkah, antara lain:
 - melakukan penggalan potensi Piutang daerah baik secara langsung kepada pemda setempat maupun secara tertulis dengan surat yang ditujukan langsung kepada instansi satuan kerja perangkat daerah;
 - melakukan pengumpulan data awal potensi Piutang daerah maupun Piutang K/L dengan bekerjasama dengan Kanwil Perbendaharaan untuk memperoleh data awal Piutang KL maupun Pemda.

- b. Persentase Produktifitas Lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Target persentase produktivitas lelang KPKNL Palangkaraya pada tahun 2024 sebesar 89% dengan realisasi sebesar 146,73% diperoleh dari perhitungan indeks laku per jenis lelang 190,38% dan indeks frekuensi lelang 117,63%. Tantangan produktivitas lelang eksekusi yang rendah atau masih cukup banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP), terutama lelang eksekusi hak tanggungan, dihadapi dengan melakukan langkah-langkah, antara lain
 - Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
 - Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).
 - Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
 - Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Palangkaraya.

Perbandingan realisasi Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan Persentase Produktifitas Lelang dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | | 2020 Target/Realisasi | 2021 Target/Realisasi | 2022 Target/Realisasi | 2023 Target/Realisasi | 2024 Target/Realisasi |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 06a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | 100% 107,14% | 100% 113,04% | 100% 266,67% | 100% 130% | 36% 150% |
| 06b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | 34% 55,99% | 35% 60,82% | 35% 55,94% | 80% 105% | 89% 164,87% |

Sasaran Strategis 7 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 1 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| KPKNL Palangkaraya | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 07a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | Min TLK |
| REALISASI | 0,00% | 0,02% | 0,00 | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | |
| CAPAIAN | 0,00% | 0,02% | 0,00 | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | |
| NILAI KINERJA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

IKU Persentase Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian dalam ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam persetujuan dengan objek penilaian berupa BMN. Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian, maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Target IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian (minimize) KPKNL Palangkaraya tahun 2024 adalah maksimal sebesar 16% dengan realisasi deviasi sebesar 0%.

Perbandingan realisasi Persentase Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | | 2020 Target/Realisasi | 2021 Target/Realisasi | 2022 Target/Realisasi | 2023 Target/Realisasi | 2024 Target/Realisasi |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 07a-CP (Minimize) | Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 30% 1,92% | 22% 6,37% | 19% 1,62% | 25% 0,23% | 16% 0% |

Sasaran Strategis 8 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi dan SDM merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| KPKNL Palangkaraya | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 08a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 45% | 60% | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% | Max TLK |
| REALISASI | 69,43% | 86,69% | 86,69% | 120,00% | 119,00% | 126,88% | 126,88% | |
| CAPAIAN | 69,43% | 86,69% | 86,69% | 120,00% | 119,00% | 126,88% | 126,88% | |
| NILAI KINERJA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

| KPKNL Palangkaraya | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 08b-N Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Max TLK |
| REALISASI | 92,26 | 98,98 | 98,98 | 96,96 | 96,96 | 96,45 | 96,45 | |
| CAPAIAN | 92,26 | 98,98 | 98,98 | 96,96 | 96,96 | 96,45 | 96,45 | |
| NILAI KINERJA | 108,54% | 116,45% | 116,45% | 114,07% | 114,07% | 113,47% | 113,47% | |

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Realisasi Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2024 adalah sebesar 126,88%. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90%. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Tantangan atau hambatan pada pencapaian IKU ini adalah masih terdapat pegawai yang tidak mengusulkan pelatihan secara mandiri, sehingga kemungkinan dipanggil pelatihan menjadi kecil. Hal ini dihadapi dengan mengimbau pegawai untuk aktif dalam mengajukan usulan diklat serta melakukan sosialisasi dan edukasi berkala terhadap pegawai melalui nota dinas, boardcast whatsapp ataupun sosialisasi secara langsung.

b. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko bertujuan Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja dan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

1. Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 25%;

2. Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30%;
3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30%;
4. Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 15%.

Aksi yang dilakukan dalam mencapai target IKU yaitu mendokumentasikan semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja di KPKNL Palangkaraya dengan lengkap. Realisasi IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko pada tahun 2024 adalah sebesar 96,45. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85.

Perbandingan realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dan Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi | Target/Realisasi |
| 08a-CP | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 100% 108,28% | 100% 115,20% | 100% 108,33% | 100% 120% | 90% 126,88% |
| 08b-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko | - | 75 80 | 80 85,37 | 80 93,35 | 85 96,45 |

Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| KPKNL Palangkaraya | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 09a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Max TLK |
| REALISASI | 99,86 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| CAPAIAN | 99,86 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| NILAI KINERJA | 99,86% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

| KPKNL Palangkaraya | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 09b-CP Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Min TLK |
| REALISASI | 0,25% | 0,53% | 0,53% | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | |
| CAPAIAN | 0,25% | 0,53% | 0,53% | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | |
| NILAI KINERJA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup nilai evaluasi kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Palangkaraya tahun 2024 adalah sebesar 120 dari target 100. Sebelum tahun 2023, satuan pengukuran IKU ini adalah persentase. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain adalah:

- Kurangnya konsistensi Rencana Pencairan Dana (RPD) dengan realisasi RPD.
- Realisasi anggaran yang tinggi, sehingga kurangnya nilai efisiensi

Langkah yang diambil KPKNL untuk pencapaian IKU ini antara lain:

- Melakukan pemilihan skala prioritas terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun, dengan tetap memperhatikan capaian output terkait.
- Selalu monitoring dan memastikan indikator capaian IKPA dan SMART DJA terpenuhi.
- Memperhatikan hal yang mempengaruhi nilai indikator capaian IKPA dan SMART DJA.
- Melaksanakan penganggaran dengan pruden. - Penghematan dilakukan setiap akan digunakannya DIPA secara seksama dan selektif.
- Menyusun RPD yang akurat dan disesuaikan dengan rencana.
- Konsisten dalam melaksanakan RPD.

b. Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

IKU deviasi data PNBPN fungsional DJKN merupakan IKU baru di tahun 2021. PNBPN fungsional DJKN merupakan jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bidad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP: 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi data PNBPN fungsional DJKN, diukur dari selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi dan selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh satker dengan periode pencatatan di OM SPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. Adapun target deviasi PNBPN dari Bidad Pengurusan Piutang Negara adalah 10% dan deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target IKU deviasi data PNBPN fungsional DJKN pada KPKNL Palangkaraya tahun 2024 maksimal sebesar 10%. Untuk realisasi diperoleh deviasi sebesar 0% yang terdiri dari deviasi PNBPN Bidad PPN 0% dan deviasi PNBPN Bea Lelang juga 0%. IKU ini baru ada di KPKNL Palangkaraya pada tahun 2022. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, adalah kadangkala adanya ketidaktepatan dalam pembukuan PNBPN Bidad Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang pada aplikasi Focus

PN dan Dropbox Lelang. Adapun Langkah- Langkah untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- Segera membukukan PNBPN Bidad Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang setiap terjadi transaksi.
- Melakukan monitoring terhadap pembukuan PNBPN dimaksud pada aplikasi Focus PN dan Dropbox Lelang secara berkala.
- Apabila terdapat perbedaan data, segera menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan/koreksi

Perbandingan realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | | 2020 Target/Realisasi | 2021 Target/Realisasi | 2022 Target/Realisasi | 2023 Target/Realisasi | 2024 Target/Realisasi |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 95% 99,98% | 95,50% 93,28% | 95,50% 94,79% | 80 93,35 | 100 120 |
| 09b-CP | Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN | - | - | 10% 0,01% | 15% 6,41% | 10% 0% |

Sasaran Strategis 10 : Komunikasi publik yang efektif

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 1 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| KPKNL Palangkaraya | Komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | 10a-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Max TLK |
| REALISASI | 105,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CAPAIAN | 105,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| NILAI KINERJA | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

Informasi publik adalah informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Keuangan selaku badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Permohonan informasi publik dari pemohon informasi wajib untuk disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, di

mana waktu penetapan kapan penghitungan dimulai apabila nomor register telah diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun target IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik KPKNL Palangkaraya tahun 2024 adalah 80 sedangkan realisasi penyelesaiannya adalah 100. Langkah-langkah KPKNL dalam mencapai target IKU ini adalah:

- melakukan pemutakhiran daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada website KPKNL Palangkaraya;
- membuat laporan PPID secara tepat waktu.

IKU di atas merupakan IKU yang baru ada di KPKNL Palangkaraya tahun 2024.

Sasaran Strategis 11 : Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| KPKNL Palangkaraya | Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | 11a-CP Indeks Efektivitas UKI | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 82 | 82 | Max TLK |
| REALISASI | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 95,38 | 95,38 | |
| CAPAIAN | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 95,38 | 95,38 | |
| NILAI KINERJA | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 116,32% | 116,32% | |

| KPKNL Palangkaraya | Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | 11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y24 | Pol/KP |
| TARGET | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Max TLK |
| REALISASI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | |
| CAPAIAN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | |
| NILAI KINERJA | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 120,00% | 120,00% | |

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Efektivitas UKI memiliki 11 unsur penilaian, yakni 1) Dukungan SDM, Akses Data dan Informasi, serta Komunikasi; 2) Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE); 3) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA); 4) Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP); 5) Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS); 6) Penyusunan Profil Pegawai; 7) Penyusunan Simpulan dan LPPI; 8) Jumlah Pengaduan Masyarakat; 9) Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat Bidang Investigasi (IBI); 10) Kepuasan Stakeholders; dan 11) Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Pengawasan dan pengendalian yang efektif bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Adapun target indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif KPKNL Palangkaraya tahun 2024 adalah sebesar 82 dengan realisasi sebesar 95,38. Langkah-langkah KPKNL dalam pencapaian IKU ini adalah:
 - Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh UKI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - Selalu memonitoring dan mengevaluasi tingkat kepatuhan UKI dalam melaksanakan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT)

- b. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan ZI WBK-WBBM adalah Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun target Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan ZI WBK-WBBM KPKNL Palangkaraya tahun 2024 adalah sebesar 100 dengan realisasi sebesar 120. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain adalah menyamakan persepsi dan mind set (pola pikir) seluruh pegawai untuk dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna layanan dengan mengedepankan nilai integritas menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Langkah-langkah KPKNL dalam pencapaian IKU ini adalah:
- Membentuk tim kerja untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian sebagai Kantor Pelayanan berpredikat ZI-WBBM dengan melibatkan seluruh pegawai, sehingga dokumen dapat maksimal telah tertuang sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE).
 - Seluruh koordinator maupun anggota tim kerja selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam menyiapkan dokumen yang telah dipersyaratkan oleh Tim Penilai.
 - Membangun dan/atau mengembangkan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan.
 - Selalu berkomitmen untuk menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan, core values ASN BerAKHLAK serta mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada para pengguna layanan KPKNL Palangkaraya.

Kedua IKU di atas merupakan IKU yang baru ada di KPKNL Palangkaraya di tahun 2024.

B. KINERJA LAINNYA

1. Penanganan Perkara
Jumlah perkara/gugatan perdata di pengadilan yang ditangani oleh KPKNL pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| No | Nomor Perkara | Tahap Pengadilan |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 26/Pdt.G/2022/PN.KIk | Selesai/Menang |
| 2. | 112/Pdt.G/2022/PN.PIk | Selesai/Menang |
| 3. | 52/Pdt.G/2022/PN.PIk | Selesai/Menang |
| 4. | 2/Pdt.G/2022/PN.KIk | Selesai/Menang |
| 5. | 205/Pdt.G/2021/PN.PIk | Selesai/Menang |
| 6. | 52/Pdt.G/2019/PN.PIk | Proses Peninjauan Kembali (PK) |
| 7. | 48/Pdt.G/2020/PN.PIk | Selesai/Damai |
| 8. | 246/Pdt.G/2024/PA.PIk | Selesai/Menang |
| 9. | 217/Pdt.G/2024/PA.PIk | Selesai/Menang |
| 10. | 47/Pdt.G/2024/PN.PIk | Selesai/Menang |
| 11. | 145/Pdt.G/2024/PN.PIk | Proses Peradilan Tingkat Pertama (PN) |

| | | |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|
| 12. | 126/Pdt.G/2024/PN.PIk | Proses Peradilan Tingkat Pertama (PN) |
| 13. | 248/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst | Proses Peradilan Tingkat Pertama (PN) |

2. Pelayanan Penilaian

Salah satu fungsi KPKNL Palangkaraya adalah melaksanakan pelayanan penilaian. Dalam rangka penilaian kekayaan negara, penilaian bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan aktual tentang jumlah dan nilai kekayaan negara. Pelaksanaan pelayanan penilaian tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Permohonan Penilaian | Jumlah Laporan |
|----|----------------------------------|----------------|
| 1. | Pemindahtanganan BMN | 75 |
| 2. | Pemanfaatan BMN | 34 |
| 3. | Penilaian Barang Sitaan/Rampasan | 41 |
| 4. | Pemindahtanganan BMD | 98 |
| 5. | Pemanfaatan BMD | 1 |
| 6. | Lainnya (LKPP) | 5 |

3. Penghargaan

Di tahun 2024, KPKNL berhasil mendapatkan beberapa penghargaan antara lain sebagai berikut:

1. Peringkat I Kategori Penilaian IKPA Pagu kecil bobot IKPA Besar.
2. Penghargaan atas Capaian Terbaik Keempat IKPA Pagu kecil bobot IKPA Besar Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah

Peringkat I Kategori Penilaian IKPA Pagu kecil bobot IKPA Besar dari KPPN Palangkaraya



Penghargaan atas Capaian Terbaik Keempat IKPA Pagu kecil bobot IKPA Besar Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah



4. Parameter Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

KPKNL Palangkaraya pada 24 September 2024 mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dihadiri para perwakilan dari pengguna layanan, akademisi, wartawan serta perwakilan kelompok disabilitas yang di hadiri SLB Negeri I Palangka Raya. Dalam pelaksanaan FKP ini menjangkau aspirasi dari berbagai kalangan terkait pelayanan yang dilaksanakan oleh KPKNL Palangkaraya termasuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok Disabilitas.

KPKNL Palangkaraya juga ikut berperan dalam pemberdayaan UMKM dengan memasarkan produk UMKM melalui pelaksanaan lelang sukarela UMKM pada tahun 2024.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palangkaraya , pada tahun 2024 KPKNL Palangkaraya telah mendapat alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 3.792.823.000,00. Dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 3.564.358.936,00 atau 93,98% dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis Belanja | Pagu Awal (Rp) | Pagu setelah revisi (Rp) | Realisasi Tahun 2024 | |
|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------|
| | | | Rp | % |
| 1. Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Belanja Barang | 2.116.824.000 | 0 | 1.952.155.552 | 92.22% |
| 3. Belanja Modal | 1.675.999.000 | 0 | 1.612.203.384 | 96.19% |
| | 3.792.823.000 | 0 | 3.564.358.936 | 93.98% |

Pasca Pandemi Covid-19 dan ketidakstabilan ekonomi dunia memberi tekanan yang cukup tinggi pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk fokus kepada 3 (tiga) pembiayaan yaitu kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tidak mampu

dan pemberian dukungan bagi dunia usaha. KPKNL Palangkaraya berpartisipasi melakukan efisiensi dan realokasi anggaran dalam pemulihan ekonomi nasional.



BAB IV

PENUTUP

A. PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Palangkaraya tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Palangkaraya dalam tahun anggaran 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palangkaraya tahun 2024 telah ditetapkan sesuai dengan peta strategi Kemenkeu *Three* KPKNL yang terdiri 11 (sebelas) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), KPKNL Palangkaraya mengalami beberapa kali Addendum terhadap target, rata-rata tingkat pencapaian sebesar 116,58%. IKU KPKNL Palangkaraya yang telah melampaui target yang ditetapkan adalah :

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Persentase produktivitas lelang
3. Indeks integritas
4. Persentase Realisasi Pokok Lelang
5. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
6. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan
7. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan
8. Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
9. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
10. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
11. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN
12. Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
13. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
14. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
15. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
16. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif
17. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM
18. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
19. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

IKU KPKNL Palangkaraya tidak ada yang masuk dalam kategori merah, kuning, abu-abu semua IKU KPKNL Palangkaraya dalam kategori Hijau.

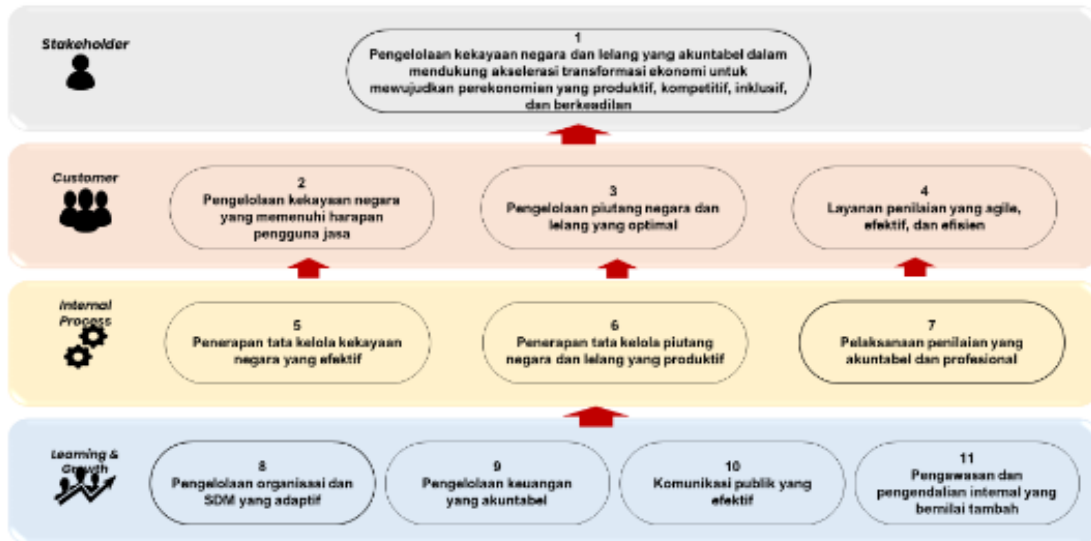
Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024 dan kondisi/permasalahan yang terjadi seluruh personel KPKNL Palangkaraya bertekad untuk meraih prestasi kinerja yang lebih baik dengan melaksanakan rencana kegiatan tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan optimal.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-01/WKN.24/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024



PETA STRATEGI



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|------------------|
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | 1a-CP Indeks integritas | 89,17 |
| | | 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (10.05M) |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | 2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan | 71,5% |
| | | 2b-CP Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN | 86,5% |
| 3 | Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal | 3a-CP Persentase realisasi pokok lelang | 100% (36M) |
| | | 3b-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% (5.23M) |
| 4 | Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien | 4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian | 75 |
| 5 | Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif | 5a-CP Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% |
| | | 5b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | 100% |
| 6 | Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif | 6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 43% (6 BKPN) |
| | | 6b-CP Persentase produktivitas lelang | 89% |
| 7 | Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional | 7a-CP Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian | 16% |
| 8 | Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif | 8a-CP Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 90% |
| | | 8b-N Indeks kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko | 85 |
| 9 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | 9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 |
| | | 9b-CP Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN | 10% |
| 10 | Komunikasi publik yang efektif | 10a-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 |
| 11 | Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah | 11a-CP Indeks efektivitas UKI | 82 |
| | | 11b-CP Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 |



| Program/ Kegiatan Tahun 2024 | Anggaran |
|--|---|
| Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko | Rp 372,091,000.00 |
| 1 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp 14,818,000.00 |
| 2 Pengelolaan Aset | Rp 357,273,000.00 |
| Program Dukungan Manajemen | Rp 3,397,218,000.00 |
| 1 Legislasi dan Litigasi | Rp 21,554,000.00 |
| 2 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp 3,375,664,000.00 |
| 3 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Rp 8,688,000.00 |
| 4 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp 14,826,000.00 |
| Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya |
|  |  |
| Ditandatangani Secara Elektronik Kusumawardhani | Ditandatangani Secara Elektronik Fredy Himarwanto |

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

| Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | | | | | | |
|-------------|---|--------|------|-------|------|------|-------|-------|
| | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | sdQ3 | Q4 | Y |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | | | | | | | |
| 1a-CP | Indeks integritas | - | - | - | - | - | 89,17 | 89,17 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | | | | | | | |
| 2a-CP | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan | - | 50% | 50% | 60% | 60% | 71,5% | 71,5% |
| 2b-CP | Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN | - | 45% | 45% | - | 45% | 86,5% | 86,5% |
| 3 | Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal | | | | | | | |
| 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien | | | | | | | |
| 4a-CP | Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 5 | Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif | | | | | | | |
| 5a-CP | Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan | - | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | 10% | 32% | 32% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 6 | Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif | | | | | | | |
| 6a-CP | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang negara | 100% | 93% | 93% | 79% | 79% | 43% | 43% |
| 6b-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 45% | 45% | 60% | 60% | 89% | 89% |
| 7 | Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional | | | | | | | |
| 7a-CP | Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 8 | Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | |
| 8a-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 10% | 60% | 60% | 75% | 75% | 90% | 90% |
| 8b-N | Indeks kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |



| Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | | | | | | |
|-------------|---|--------|-----|-------|-----|------|-----|-----|
| | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | sdQ3 | Q4 | Y |
| 9 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | |
| 9a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9b-CP | Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 10 | Komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
| 10a-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 11 | Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah | | | | | | | |
| 11a-CP | Indeks efektivitas UKI | - | - | - | - | - | 82 | 82 |
| 11b-CP | Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya,



Ditandatangani Secara Elektronik
Fredy Himarwanto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

| No | IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|----|-----|---------------------|----------------|------------|--------|---------------------|------------------|------------|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | |

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Palangkaraya



Ditandatangani Secara Elektronik
Fredy Himarwanto



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari sd 31 Desember Tahun 2024

| PEGAWAI YANG DINILAI | | | PEJABAT PENILAI KINERJA | |
|-----------------------|---|--|-------------------------|--|
| NAMA | Fredy Himarwanto, SH | | NAMA | Kusumawardhani |
| NIP | 197403161995031001 | | NIP | 196908231996032001 |
| PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Tingkat I, IV/b | | PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama Muda, IV/c |
| JABATAN | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya | | JABATAN | Kepala Kantor Wilayah |
| UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah | | UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah |
| NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A UTAMA | | | | |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | Indeks integritas | 89,17 | Pemangku kepentingan |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | Pemangku kepentingan |



| | | | | |
|----|---|---|-------|-------------------------|
| | kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | | | |
| 3 | Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan | 71,5% | Penerima layanan |
| 4 | Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN | 86,5% | Penerima layanan |
| 5 | Pengelolaan piutang negara dan lelang Yang optimal | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | Penerima layanan |
| 6 | Pengelolaan piutang negara dan lelang Yang optimal | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% | Penerima layanan |
| 7 | Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien | Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian | 75 | Penerima layanan |
| 8 | Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif | Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% | Proses internal |
| 9 | Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif | Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | 100% | Proses internal |
| 10 | Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang negara | 100% | Proses internal |
| 11 | Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif | Persentase produktivitas lelang | 89% | Proses internal |
| 12 | Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional | Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian | 16 | Proses internal |
| 13 | Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 90% | Pengembangan organisasi |
| 14 | Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif | Indeks kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko | 85 | Pengembangan organisasi |
| 15 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | Pengembangan organisasi |
| 16 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN | 10% | Pengembangan organisasi |



| | | | | |
|----|---|--|-----|-------------------------|
| 17 | Komunikasi publik yang efektif | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | Pengembangan organisasi |
| 18 | Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah | Indeks efektivitas UKI | 82 | Pengembangan organisasi |
| 19 | Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah | Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan zi-wbk/WBBM | 100 | Pengembangan organisasi |

B TAMBAHAN

| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|--|--|
| 1 | <p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan</p> |
| 2 | <p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyoal kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara</p> |
| 3 | <p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri</p> |
| 4 | <p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban</p> |
| 5 | Loyal | |



| PERILAKU KERJA | |
|----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara |
| 6 | <p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif |
| 7 | <p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama |

Pegawai yang Dinilai,

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Fredy Himarwanto
197403161995031001



Ditandatangani secara elektronik

Kusumawardhani
196908231996032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari sd 31 Desember Tahun 2024

| DUKUNGAN SUMBER DAYA | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 25 pegawai | | | | | | | |
| | Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain | | | | | | | |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN | | | | | | | | |
| 1 | Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan | | | | | | | |
| No | IKI | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | sdQ3 | Q4 | Y |
| 1 | Indeks integritas | - | - | - | - | - | 89,17 | 89,17 |
| 2 | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan | - | 50% | 50% | 60% | 60% | 71,5% | 71,5% |
| 4 | Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN | - | 45% | 45% | - | 86.5% | 86.5% | 86,5% |
| 5 | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 8 | Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan | - | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 9 | Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | 10% | 32% | 32% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 10 | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang negara | 100% | 93% | 93% | 79% | 79% | 43% | 43% |
| 11 | Persentase produktivitas lelang | 30% | 45% | 45% | 60% | 60% | 89% | 89% |



| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 13 | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 10% | 60% | 60% | 75% | 75% | 90% | 90% |
| 14 | Indeks kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 15 | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Persentase deviasi data PNPB fungsional DJKN | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 17 | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 18 | Indeks efektivitas UKI | - | - | - | - | - | 82 | 82 |
| 19 | Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| KONSEKUENSI | | | | | | | | |
| 1 | <i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku</i> | | | | | | | |
| 2 | <i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku</i> | | | | | | | |

Pegawai yang Dinilai,

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Fredy Himarwanto

197403161995031001



Ditandatangani secara elektronik

Kusumawardhani

196908231996032001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-07A/WKN.12/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-07/WKN.12/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Semula | | Menjadi | | |
|-----|--|-------------------|--|-------------------|---|------------------|
| | | Indikator Kinerja | Target | Indikator Kinerja | Target | |
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan | 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100 (10,05 M) | 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100 (14,06 M) |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa | 2b-CP | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100 (36 M) | 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100 (129 M) |
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 9a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 9a-CP Indeks Kinerja Anggaran | 100 |
| 19 | Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah | 11b-CP | Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | 11b-CP Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 |

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

| Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Sebelum | | | | | | | Menjadi | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-----|--------|-----|---------|-------|---------------|----------|--|-----|-----|--------|-------|---------|-------|---------------|
| | | Target | | | | | | | Target | | | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
| 1a-CP | Indeks integritas | - | - | - | - | - | 89,17 | 89,17 | 1a-CP | Indeks integritas | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 89,17 | 89,17 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (10,05 M) | 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (14,06 M) |
| 2a-CP | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | - | 50 | 50 | 60 | 60 | 71,5 | 71,5 | 2a-CP | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 71,5 | 71,5 |
| 2b-CP | Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN | - | 45 | 45 | - | 45 | 86,5 | 86,5 | 2b-CP | Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN | 10 | 45 | 45 | 60 | 60 | 86,5 | 86,5 |
| 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (36 M) | 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (129 M) |
| 5a-CP | Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan | - | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 5a-CP | Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 6a-CP | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100 | 93 | 93 | 79 | 79 | 43 | 43 | 6a-CP | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100 | 86 | 86 | 78,57 | 78,57 | 42,86 | 42,86 |

e. **Perubahan Trajectory Target IKU**

| Sebelum | | | | | | Menjadi | | | | | |
|----------|---|--------|---------|------|------|-------------|---|--------|---------|------|------|
| Kode IKU | Indikator Kinerja Utama | Target | | | | Kode SS/IKU | Indikator Kinerja Utama | Target | | | |
| | | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | | | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
| 1b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | 60% | 60% | 80% | 80% | 1b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 7a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 7a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7b-N | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | 85% | 85% | 100% | 100% | 7b-N | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | - | - | 100% | 100% |

f. **Perubahan Kode IKU**

| Kode IKU | | Indikator Kinerja Utama |
|----------|---------|---|
| Sebelum | Menjadi | |
| 3d-CP | 5a-CP | Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) |
| 8c-N | 8a-N | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif |
| 8d-N | 8b-N | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM |

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Banjarbaru, 27 September 2023

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Kalimantan Selatan dan Tengah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Palangka Raya,



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani



Ditandatangani Secara Elektronik
Fredy Himarwanto

| Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Sebelum | | | | | | | Menjadi | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----|--------|-----|---------|------|------|---------|---|--------|-----|---------|-----|-----|-----|------|
| | | Target | | | | | | | Target | | | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | | |
| 8a-CP | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 15% | 40% | 40% | 75% | 75% | 100% | 100% | 8a-CP | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 45% | 60% | 60% | 80% | 80% | 90% | 100% |
| 9a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9a-CP | Indeks kinerja anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11a-CP | Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 11a-CP | Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 82 | 82 |
| 11b-CP | Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11b-CP | Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Banjarbaru, 31 Mei 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya,



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani



Ditandatangani secara elektronik
Fredy Himarwanto

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

| Semula | | | | |
|---------|--|--|------------------|----------------------------------|
| No. | Rencana Hasil Kerja | Indikator Kinerja Individu | Target | Perspektif |
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100 (10,05 M) | Penerima Layanan |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100 (36 M) | Penerima Layanan |
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 10 | Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| Menjadi | | | | |
| No. | Rencana Hasil Kerja | Indikator Kinerja Individu | Target | Perspektif |
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100 (14,06 M) | Penerima Layanan |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100 (129 M) | Penerima Layanan |
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | Indeks Kinerja Anggaran | 100 | Penguatan Internal atau |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <i>Anggaran</i> |
| 10 | Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 <i>Penguatan Internal atau Anggaran</i> |

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

| Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Sebelum | | | | | | | Menjadi | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-----|--------|-----|---------|-------|---------------|----------|--|-----|-----|--------|-----|---------|-------|---------------|
| | | Target | | | | | | | Target | | | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Indeks integritas | - | - | - | - | - | 89,17 | 89,17 | 1 | Indeks integritas | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 89,17 | 89,17 |
| 2 | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (10,05 M) | 2 | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (14,06 M) |
| 3 | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | - | 50 | 50 | 60 | 60 | 71,5 | 71,5 | 3 | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 71,5 | 71,5 |
| 4 | Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN | - | 45 | 45 | - | 45 | 86,5 | 86,5 | 4 | Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN | 10 | 45 | 45 | 60 | 60 | 86,5 | 86,5 |
| 5 | Persentase realisasi pokok lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (36 M) | 5 | Persentase realisasi pokok lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (129 M) |
| 8 | Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan | - | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 8 | Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|------|------|------|------|------|-------|--|-----|------|------|----|----|----|----|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6a-CP | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100 | 93 | 93 | 79 | 79 | 43 | 43 | 6a-CP | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100 | 86 | 86 | 71 | 71 | 43 | 43 |
| | | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 | 6 | | | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 |

Banjarbaru, 18 September 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya.



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani



Ditandatangani secara elektronik
Fredy Himarwanto

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Individu

| Sebelum | | | Menjadi | | |
|----------|---|-------------------|----------|---|---------------------|
| Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Target | Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Target |
| 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100 (Rp129M) | 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100 (Rp141M) |
| 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100 (Rp5,23jt) | 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100 (Rp10,565jt) |

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

| Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Sebelum | | | | | | | Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Menjadi | | | | | | |
|----------|---|---------|-----|--------|-----|---------|-----|-----|----------|---|---------|-----|--------|-----|---------|-----|-----|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
| 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6a-CP | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100 | 93 | 93 | 79 | 79 | 43 | 43 | 6a-CP | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100 | 86 | 86 | 71 | 71 | 43 | 43 |

Banjarbaru, 18 September 2024

Pejabat yang dinilai.



Ditandatangani secara elektronik
Fredy Himarwanto

Pejabat penilai kinerja.



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-07C/WKN.12/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-07/WKN.12/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah dilakukan adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-07A/WKN.12/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan PK-07B/WKN.12/2024 tanggal 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Sebelum | | | Menjadi | | |
|----|--|----------|---|-------------------|----------|---|---------------------|
| | | Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Target | Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Target |
| 3 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal | 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp141M) | 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp144,01M) |
| | | 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% (Rp5,23M) | 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% (Rp10,31M) |
| 6 | Penerapan tata Kelola piutang negara dan Lelang yang produktif | 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 43% (6 berkas) | 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 36% (5 berkas) |

B. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Individu

| Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Sebelum | | | | | | | Menjadi | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---------|------|-------|------|---------|------|------|---------|----|-------|------|---------|------|------|------|
| | | Q1 | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Q1 | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | |
| 3a-CP | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3a-CP | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-07C/WKN.12/2024**

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-07/WKN.12/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah dilakukan adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-07A/WKN.12/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan PK-07B/WKN.12/2024 tanggal 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Kode IKU | Sebelum | | Kode IKU | Menjadi | |
|----|--|----------|---|-------------------|----------|---|---------------------|
| | | | Indikator Kinerja Individu | Target | | Indikator Kinerja Individu | Target |
| 3 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal | 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp141M) | 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp144,01M) |
| | | 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% (Rp5,23M) | 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% (Rp10,31M) |
| 6 | Penerapan tata Kelola piutang negara dan Lelang yang produktif | 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 43% (6 berkas) | 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 36% (5 berkas) |

B. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Individu

| Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Sebelum | | | | | | | | Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Menjadi | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---------|------|-------|------|---------|------|------|------|----------|----------------------------|---------|-------|------|---------|------|------|--|--|
| | | Q1 | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Q1 | | | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | | |
| 3a-CP | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3a-CP | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|---|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | Persentase realisasi pokok lelang | | | | | | | | (Rp141M) | | Persentase realisasi pokok lelang | | | | | | | (Rp144,01M) |
| 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6a-CP | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100% | 93% | 93% | 71% | 71% | 43% | 43% | (6) | 6a-CP | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100% | 86% | 86% | 71% | 71% | 36% | 36% |

Banjarbaru, 19 November 2024

Menyetujui.
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya.

Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani

Ditandatangani secara elektronik
Fredy Himarwanto

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya tanggal 18 November 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

| Semula | | | | |
|---------|--|---|--------|------------------|
| No. | Rencana Hasil Kerja | Indikator Kinerja Individu | Target | Perspektif |
| 5 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | Penerima Layanan |
| 6 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100% | Penerima Layanan |
| 10 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% | Proses Internal |
| Menjadi | | | | |
| No. | Rencana Hasil Kerja | Indikator Kinerja Individu | Target | Perspektif |
| 5 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | Penerima Layanan |
| 6 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100% | Penerima Layanan |
| 10 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% | Proses Internal |

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

| Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Sebelum | | | | | | | | Menjadi | | | | | | | |
|----------|---|---------|------|-------|------|---------|------|------|-------|---|-------|------|---------|------|------|------|-----|
| | | Q1 | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | Q1 | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | | |
| 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3b-CP | Persentase penurunan outstanding piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6a-CP | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100% | 93% | 93% | 71% | 71% | 43% | 43% | 6a-CP | Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100% | 86% | 86% | 71% | 71% | 36% | 36% |

Banjarbaru, 19 November 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja.

Ditandatangani secara elektronik
Fredy Himarwanto

Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani